



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2012



Kerjasama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Belitung Timur

Dengan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur



Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Belitang Timur

2012

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2012

Katalog BPS : 1413.1906
No. Publikasi : 19065.1009
Ukuran Buku : A4 (21 cm x 29,7 cm)
Jumlah Halaman : vi + 46

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :
BPS Kabupaten Belitung Timur
Dan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dicetak Oleh :

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya



BUPATI BELITUNG TIMUR

KATA SAMBUTAN

Pemenuhan ketersediaan data statistik mengenai pembangunan manusia tentunya memiliki dimensi yang sangat luas, lengkap dan terpercaya, yang dapat menggambarkan kondisi daerah dengan berbagai variasi sangat diperlukan.

Sebagai bagian yang terintegrasi dengan pembangunan nasional, pembangunan daerah perlu terus dipantau gerak perkembangannya serta menelaah implikasi yang terkandung didalamnya, melalui indeks-indeks komposit seperti halnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga pemerintah daerah dapat terus mengetahui keadaannya dalam seluruh upaya melaksanakan visi dan misinya melalui program yang dijalankan.

Dan saya menyambut baik Publikasi **Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012**. Indeks tersebut merupakan refleksi dari keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Belitung Timur sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan serta dalam pengambilan keputusan.

Semoga semua yang baik ini dapat terus dibina, dikembangkan serta ditingkatkan dimasa mendatang.

Manggar, Oktober 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR

dr. BASURI TJ. PURNAMA, M.GIZI.Sp.GK

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini merupakan upaya kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka pemenuhan berbagai kebutuhan informasi statistik di daerah.

Disusun untuk dapat menggambarkan pencapaian pembangunan yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia, dan diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan strategis program pembangunan di Kabupaten Belitung Timur menuju arah yang lebih baik melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait.

Sebagaimana ukuran-ukuran komposit pada umumnya, Indeks Pembangunan Manusia harus digunakan dengan sangat hati-hati. Meskipun indeks-indeks tersebut memberikan petunjuk umum tentang kebutuhan dan prioritas pembangunan manusia, berbagai indeks tersebut perlu diinterpretasikan dengan informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif lainnya.

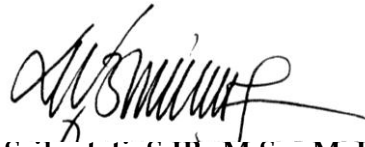
Disadari penyusunan publikasi ini masih banyak terdapat kekurangan. Akan tetapi, kami berharap bahwa pembaca akan menemukan bahwa publikasi ini dapat memberikan sumbangan yang dapat mendorong bagi peningkatan masyarakat yang sejahtera, dan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh, melalui pemberdayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur.

Manggar, Oktober 2013



Zainubi, S.Sos

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Belitung Timur



Yeni Srihartati, S.IP., M.Sc., M. Eng

Kepala Bappeda
Kabupaten Belitung Timur

DAFTAR ISI

<i>Kata Sambutan</i>	<i>i</i>
<i>Kata Pengantar</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>v</i>
<i>Daftar Gambar</i>	<i>vi</i>

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	6
1.3. Sistematika Penulisan	7

BAB 2 : METODOLOGI

2.1. Metodologi	9
2.2. Indeks Pembangunan Manusia	10
2.3. Lamanya Hidup (Longevity)	13
2.4. Tingkat Pendidikan	14
2.5. Tingkat Hidup Layak	16
2.6. Reduksi Shortfall	17
2.7. Sumber Data	18

BAB 3 : GAMBARAN UMUM	20
3.1. Letak Geografis	20
3.2. Pemerintahan	21
3.3. Kependudukan	21
3.4. Perekonomian (PDRB)	22
3.5. Alokasi APBD	26

BAB 4 : POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA	29
4.1. Posisi Pembangunan Manusia	29
4.2. Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia	30
4.3. Indeks Lamanya Hidup	30
4.4. Indeks Pendidikan	32
4.5. Indeks Paritas Daya Beli	34
4.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	35

BAB 5 : PENUTUP	41
5.1. Kesimpulan	41
5.2. Implikasi Kebijakan	42

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1	Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	11
2.2	Tahun Konversi Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	15
3.1	PDRB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006-2012	23
3.2	APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2001-2012	27
4.1	Nilai Komponen IPM 2007 & 2012	30
4.2	Nilai Indeks Komponen IPM 2007 - 2012	37

DAFTAR GAMBAR

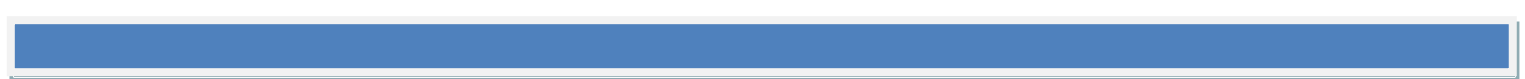
Gambar

3.1	Struktur Ekonomi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2012 (Persen)	24
3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007-2012 (Persen)	25
4.1	Angka Harapan Hidup dan Indeks Harapan Hidup Kabupaten Belitung Timur 2007 dan 2012	31
4.2	Indeks Pendidikan Kabupaten Belitung Timur 2007 dan 2012	32
4.3	Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belitung Timur 2007 dan 2012	33
4.4	Indeks Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belitung Timur 2007 dan 2012	33
4.5	Paritas Daya Beli dan Indeks Paritas Daya Beli Kabupaten Belitung Timur 2007 dan 2012	35
4.6	Nilai Indeks Komponen IPM Kabupaten Belitung Timur 2007 dan 2012	36
4.7	IPM menurut Kabupaten/Kota tahun 2007-2012	38

Bab

1

Pendahuluan



Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

"The basic purpose of development is to enlarge people's choices. In principle, these choices can be infinite and can change over time. People often value achievements that do not show up at all, or not immediately, in income or growth figures: greater access to knowledge, better nutrition and health services, more secure livelihoods, security against crime and physical violence, satisfying leisure hours, political and cultural freedoms and sense of participation in community activities. The objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives."

- Mahbub ul Haq, UNDP -

Memasuki dasawarsa 1990-an UNDP (*United Nations Development Programme*) memperkenalkan paradigma pembangunan baru mengenai pembangunan yang disebut dengan Paradigma Pembangunan Manusia. Tercapainya suatu pembangunan manusia dapat tercermin dari terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan, termasuk kesempatan memperoleh pendapatan, mendapat pelayanan kesehatan, serta memperoleh pelayanan pendidikan. Paradigma Pembangunan Manusia digunakan untuk mendeteksi kinerja pembangunan manusia yang tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan

ekonomi dan menempatkan pendapatan sebagai ukuran pencapaian suatu pembangunan, melainkan memperhitungkan pula ukuran pencapaian pembangunan manusia. Pembangunan manusia yang dilakukan bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan penduduk melainkan juga diarahkan kepada tercapainya produktivitas yang tinggi yang diikuti pemerataan, kesinambungan, serta pemberdayaan terhadap manusia itu sendiri.

Berbeda dengan konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia, maka pembangunan manusia mempunyai konsep yang lebih luas yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia disekeliling pembangunan.

Pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki manusia. Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pilihan lain yang tak kalah pentingnya, adalah kebebasan berpolitik, jaminan atas hak asasi dan harga diri. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia, seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan, tetapi pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pembangunan manusia mensyaratkan adanya kebebasan. Tujuan utama dari pembangunan manusia adalah memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia, karena tidak mungkin tanpa adanya kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan menjalani kehidupan, maka pembangunan manusia seutuhnya dapat tercapai secara optimal. Sehingga manusia harus bebas melakukan apa yang menjadi pilihannya. Dalam hal ini, pembangunan manusia dan hak azasi manusia dianggap mempunyai kesamaan visi dan tujuan, yaitu untuk menjamin kebebasan, kemakmuran dan harga diri bagi semua orang dimanapun mereka berada.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersama-sama semua isu dalam masyarakat; pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Dengan demikian pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, merupakan salah satu langkah strategis yang harus dikaji dengan seksama. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut, paradigma manajemen pemerintah daerah mengalami pergeseran yang sangat drastis, dari yang sebelumnya serba sentralistis menuju sistem yang desentralistis. Dan ini menuntut pembangunan daerah yang lebih terarah.

Dimasukkannya konsep pembangunan manusia ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan daerah sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu (seperti : mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan secara absolut, kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang dan mencegah kerusakan lingkungan). Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama ; yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Pembangunan manusia mempunyai batasan yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan ekonomi, karena tujuan pembangunan manusia bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan penduduk, melainkan diarahkan kepada tercapainya produktivitas yang tinggi, diikuti dengan pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Dengan kata lain pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang penduduk agar dapat hidup layak.

Tujuan tersebut dapat dicapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan kemungkinan umur panjang; berpendidikan dan berketerampilan; serta mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak

Agar semua konsep yang luas dan menyeluruh yang merangkum kisaran luas potensi manusia mulai dari kesehatan dan gizi, pendidikan sampai kebebasan demokratis dan kualitas hidup yang disebut pembangunan manusia tersebut dapat diterjemahkan ke dalam pembuatan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat dipantau dan diukur dengan mudah yang diterjemahkan ke dalam data statistik.

Walaupun masih terdapat berbagai kesulitan dalam penyederhanaan konsep holistik pembangunan manusia menjadi satu angka, penting disadari bahwa konsep pembangunan manusia lebih mendalam dan lebih kaya dari ukurannya. Sangatlah tidak mungkin untuk menghasilkan suatu ukuran komprehensif karena banyak dimensi penting dari pembangunan manusia yang tidak terukur. Walaupun demikian, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui dan secara efektif menangkap seberapa jauh upaya pemberdayaan yang telah dicapai manusia yaitu dengan menggunakan indikator komposit. Salah satu indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasikan UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia – IPM (*Human Development Indeks - HDI*), yang menggabungkan ukuran usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan, menjadi satu angka tunggal.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung Timur 2011 adalah untuk menggambarkan keadaan pembangunan Belitung Timur dalam tahun 2006 - 2011. Dengan melihat indikasi dari data-data yang tersedia yang dapat dipergunakan untuk menghitung IPM, yaitu ukuran usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan.

Dengan tersedianya informasi mengenai IPM ini diharapkan Kabupaten Belitung Timur mempunyai indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian pembangunan terutama yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia yang mencakup harapan hidup, pendidikan, dan standart hidup layak. Disamping itu IPM dapat juga dijadikan sebagai masukkan dalam penyusunan evaluasi dan

penentu arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

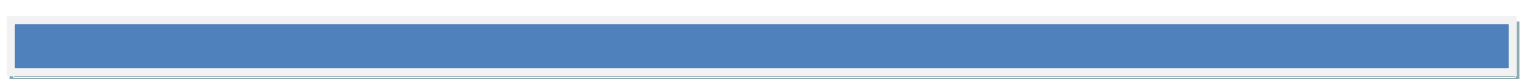
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Timur dalam tahun 2007-2012 dibagi pembahasannya ke dalam lima (5) Bab.

- Bab Satu : Menguraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.
- Bab Dua : Membahas tentang metodologi, yang meliputi pengertian, konsep, metode yang digunakan, penjelasan komponen-komponen serta cara penghitungan indeks bagi masing-masing komponen IPM.
- Bab Tiga : Memberi gambaran umum Kabupaten Belitung Timur yang akan dirinci secara garis besar mengenai letak, sejarah, dan keadaan geografis, disusul dengan analisis deskriptif mengenai perkonomian (PDRB), potensi dan pemanfaatan sumberdaya alam serta alokasi APBD Kabupaten Belitung Timur.
- Bab Empat : Membahas mengenai posisi pembangunan manusia di Kabupaten Belitung Timur yang meliputi Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Paritas Daya Beli serta IPM itu sendiri.
- Bab Lima : Bab Penutup, yang berisikan kesimpulan, saran serta implikasi kebijakan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan strategis program pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.

Bab
2

Metodologi



Bab 2

Metodologi

2.1. METODOLOGI

Paradigma pembangunan yang diperkenalkan oleh UNDP pada dasawarsa 1990-an yang dikenal sebagai Paradigma Pembangunan Manusia, tidak saja menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan menempatkan pendapatan sebagai ukuran pencapaian suatu pembangunan, melainkan memperhitungkan pula ukuran pencapaian pembangunan manusia.

Pembangunan manusia mempunyai batasan yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan ekonomi, karena tujuan pembangunan manusia tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan penduduk, melainkan diarahkan kepada tercapainya produktivitas yang tinggi, yang diikuti dengan pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Dengan kata lain pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak.

Tujuan tersebut dapat dicapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan kemungkinan panjang umur; berpendidikan dan berketerampilan; serta mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak, yang digambarkan dengan sebuah Indikator Kompisit.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia suatu wilayah melalui tiga dimensi pokok pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak.

Keberhasilan pembangunan manusia ditandai dengan peningkatan usia rata-rata masyarakatnya dan juga ditandai dengan peningkatan pengetahuan yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya dengan tercapainya dua hal tersebut, akan meningkatkan produktifitas yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu hidup yang layak bagi masyarakat.

2.2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia disusun dari tiga komponen yaitu:

1. Lamanya hidup diukur dengan harapan hidup pada saat lahir,
2. Tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga),
3. Dan tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).

Indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut di atas :

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana ;

- X₁ : Indeks Harapan Hidup
- X₂ : Indeks Pendidikan = 2/3 (Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks rata-rata lama sekolah)
- X₃ : Indeks paritas daya beli

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran.

No	Komponen IPM	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka Harapan Hidup	25	85	Standart UNDP
2	Angka Melek Huruf	0	100	Standart UNDP
3	Rata-rata Lama Sekolah	0	15	UNDP menggunakan metode Combine
4	Paritas Daya Beli	300.000 (1996) 360.000 (1999) ^{a)}	732.720 ^{b)}	UNDP menggunakan PDB rill perkapita yang telah disesuaikan

Keterangan :

a) penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

b) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

Sumber : Human Development Report (HDR) Indonesia, 2002

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan.

Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{Index } X_{(i)} = (X_{(i)} - X_{(i-\text{min})}) / (X_{(i-\text{max})} - X_{(i-\text{min})})$$

Dimana ;

$X_{(i)}$: Indikator ke i (i=1,2,3)

$X_{(i-\text{min})}$: Nilai minimum dari Xi

$X_{(i-\text{max})}$: Nilai maksimum dari Xi

Menurut skala internasional IPM dibagi menjadi 3 kategori, tinggi (IPM $\geq 80,00$), menengah ($50 \leq \text{IPM} < 80$), dan rendah (IPM < 50). BPS, BAPPENAS, UNDP, 2001 membagi tingkatan menengah menurut skala internasional menjadi kelas 'menengah-atas dan 'menengah-bawah' maka status pembangunan manusia dapat dibagi kedalam empat kategori yaitu :

Tinggi	IPM $\geq 80,00$
Menengah ke Atas	$66 \leq \text{IPM} < 80$
Menengah ke Bawah	$50 \leq \text{IPM} < 66$
Rendah	IPM < 50

Seperti dalam rekomendasi UNDP, meskipun telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, namun hingga saat ini masih digunakan ketiga komponen variabel indikator tersebut untuk penghitungan IPM, yaitu komponen lamanya hidup (*Longevity*) yang diwakili dengan Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy at Age 0; eo*), komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu Angka Melek Huruf (*Literacy Rate/Lit*) dan Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schoolling/MYS*) dan Indikator Hidup Layak (*Decent Living*) atau kemakmuran yang diwakili oleh *Purchising Power Parity/Paritas Daya Beli*, Lihat Boks 2.1.

Boks 2.1



2.3. LAMANYA HIDUP (*Longevity*)

Seperti yang telah disebutkan dalam BPS-UNDP (1996) bahwa sebenarnya agak “berlebihan” jika mengatakan angka harapan hidup (AHH) (variabel e_0) dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat”, mengingat angka morbiditas/kesakitan tampaknya lebih valid dalam mengukur “hidup sehat”. Meskipun demikian, karena keterbatasan data dan hanya sedikit negara yang memiliki data morbiditas yang dapat dipercaya maka variabel angka morbiditas/kesakitan tersebut tidak digunakan untuk tujuan perbandingan.

Penggunaan angka harapan hidup didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan *resultante* dari berbagai indikator kesehatan.

Angka harapan hidup merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi dan lain-lain. Oleh karena itu AHH untuk sementara dianggap bisa mewakili indikator lama hidup.

Angka harapan hidup tersebut dihitung dengan menggunakan masukan data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), dibantu paket program *Mortpack*, dengan pendekatan tak langsung (*indirect*) metode Trussel dengan model West yang dianggap sesuai dengan kondisi Indonesia merujuk 3-4 tahun dari tahun survei.

2.4. TINGKAT PENDIDIKAN

Komponen tingkat pendidikan diukur dari dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Indikator angka melek huruf ini diberi bobot dua per tiga.

Bobot sepertiga sisanya diberikan pada indikator rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah tersebut dihitung secara simultan dari variabel partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Dengan menggunakan konversi seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Tahun Konversi Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun Konversi
(1)	(2)	(3)
1	Tidak/Belum Tamat	0
2	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	1 s/d 6
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Umum/Kejuruan/Madrasah Tsanawiyah	7 s/d 9
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Umum/SMK/Madrasah Aliyah	10 s/d 12
5	Diploma I (DI)	13
6	Diploma II (DII)	14
7	Diploma III (DIII)	15
8	Diploma IV (DIV) S1	16 s/d 17
9	Strata 2 (S2)	18
10	Stara 3 (S3)	21

Adapun rumus untuk menghitung rata-rata lama sekolah adalah :

$$MYS = \frac{\sum f_i * Y_{s_i}}{\sum f_i}$$

Dimana ;

MYS : Rata-rata lama sekolah

f_i : Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Y_{s_i} : Tahun konversi + kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki -1.

2.5. TINGKAT HIDUP LAYAK

Tingkat hidup Layak atau standar hidup, dalam publikasi ini didekati dengan menggunakan pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan. Data dasar yang digunakan bersumber dari data Modul Susenas. Kemudian data pengeluaran perkapita tersebut disesuaikan dan kemudian *dideflate* dengan suatu indeks harga untuk memperoleh pengeluaran riil perkapita.

Indeks harga yang digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Indeks/CPI*). Selanjutnya nilai riil tersebut dibagi dengan paritas daya beli – *Purchasing Power Parity* (PPP) untuk memperoleh nilai rupiah yang sudah disetarakan antar daerah.

Nilai daya beli atau PPP untuk setiap daerah yang merupakan harga suatu kelompok barang, relatif terhadap harga barang yang sama di daerah yang telah ditetapkan sebagai standar. Dimana pada penghitungan ini yang digunakan sebagai standar harga adalah harga di Jakarta Selatan.

Adapun penghitungan PPP adalah sebagai berikut:

$$PPP = \sum E_{(i;j)} / \sum P_{(9;j)} * Q_{(i;j)}$$

Dimana ;

$E_{(i;j)}$: pengeluaran untuk komoditi j di daerah i

$P_{(9;j)}$: harga komoditi j di Jakarta Selatan

$Q_{(i;j)}$: volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di daerah i

Penghitungan PPP didasarkan pada harga 27 komoditas yang ditanyakan pada Modul Susenas. Langkah terakhir adalah menyesuaikan nilai pengeluaran riil perkapita dengan harga yang sudah distandarkan

tersebut melalui Formula Atkinson, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 C(I) &= C_{(i)} && \text{jika } C_{(i)} \leq Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} && \text{jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z \\
 &\text{dst.}
 \end{aligned}$$

Dimana ;

$C_{(i)}$: PPP dari nilai riil pengeluaran perkapita

Z : batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp. 549.500,00 per kapita per tahun atau Rp. 1.500,00 per kapita per hari.

2.6. REDUKSI *Shortfall*

Perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu dapat diukur dengan rata-rata reduksi *shortfall* per tahun. Nilai *shortfall* berguna untuk mengukur keberhasilan dipandang dari segi jarak antara apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, yaitu jarak terhadap nilai maksimum.

Nilai reduksi *shortfall* yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Dengan rumus :

$$r = \left\{ \frac{((IPM_{(t+n)} - IPM_{(t)}) / (IPM_{(ideal)} - IPM_{(t)})) * 100 \right\}^{1/n}$$

Dimana ;

r : reduksi *shortfall* per tahun

$IPM_{(t+n)}$: IPM tahun t

$IPM_{(n)}$: IPM tahun t+n

$IPM_{(ideal)}$: 100

Ada 4 kategori reduksi *shortfall* pertahun, yaitu sangat lambat jika nilainya < 1,3, lambat jika nilainya antara 1,3 - 1,5, menengah jika nilainya 1,5 - 1,7 dan cepat jika nilainya > 1,7. Semakin besar reduksi *shortfall* pertahun maka semakin besar kemajuan yang dicapai daerah tersebut dalam periode tersebut.

2.7. SUMBER DATA

Sumber data utama yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan penyusunan publikasi IPM Kabupaten Belitung Timur 2012 adalah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2007 dan 2012, Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan survei lain yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dilengkapi juga data dan informasi dari dinas, badan dan bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Gambaran Umum



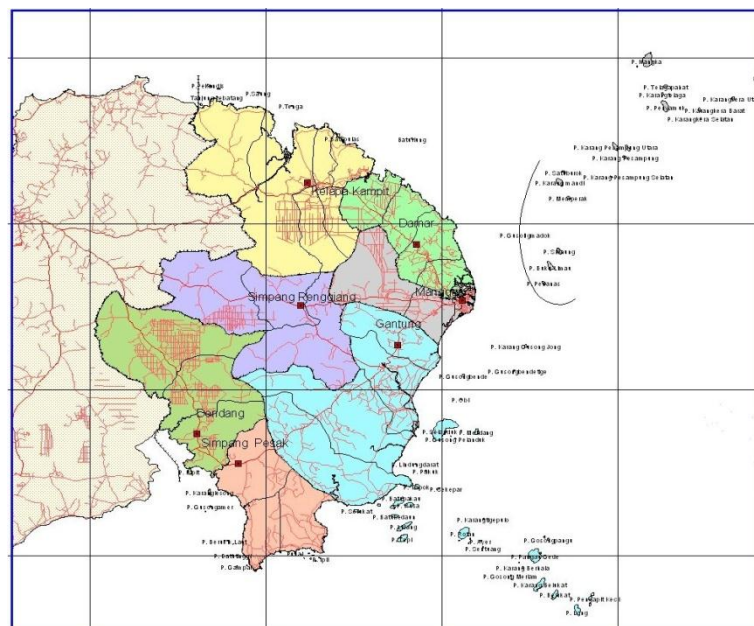
Bab 3

Gambaran Umum

3.1. LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Belitung Timur secara geografis terletak pada $107^{\circ}45'$ sampai $108^{\circ}18'$ Bujur Timur dan $02^{\circ}30'$ sampai $03^{\circ}15'$ Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Belitung Timur terletak di Pulau Belitung, tepatnya bagian sebelah timur Pulau Belitung dan merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peta Kabupaten Belitung Timur



Wilayah Kabupaten Belitung Timur di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna, di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Belitung dan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata. Kabupaten Belitung Timur mempunyai luas wilayah daratan 2.506,91 km² dan wilayah lautan 15.461,03 km², yang terbagi atas 7 (tujuh) Kecamatan, dengan 3 (tiga) diantaranya merupakan kecamatan baru yaitu : Dendang, Gantung, Manggar, Kelapa Kampit, Simpang Renggiang, Simpang Pesak dan Damar, serta terbagi menjadi 39 (tiga puluh sembilan) Desa di dalamnya, dengan Manggar sebagai Ibu Kota Kabupatennya

3.2. PEMERINTAHAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 menjadi dasar terbentuknya kabupaten ini. Dimana berdasarkan undang-undang tersebut Pulau Belitung yang tadinya hanya terdiri dari satu kabupaten yaitu Kabupaten Belitung, sekarang dibagi menjadi dua kabupaten yaitu : Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Dibentuk sejak tanggal 25 Februari 2003, bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka Selatan di wilayah Propinsi ke-31 di Indonesia, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.3. KEPENDUDUKAN

Sensus Penduduk (SP) 2010 mencatat, penduduk Kabupaten Belitung Timur adalah sebanyak 106.463 jiwa, yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Desa. Dimana sebagian besar penduduk yang mendiami kabupaten ini adalah berasal dari etnis melayu, dan banyak

terdapat juga etnis cina. Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk BPS Tahun 2012, penduduk pertengahan tahun Kabupaten Belitung Timur berjumlah 112.569 jiwa yang terdiri dari 51,96 persen penduduk laki-laki dan 48,04 persen penduduk perempuan. Adapun kepadatan penduduknya mencapai 45 jiwa per km².

3.4. PEREKONOMIAN (PDRB)

Potret potensi ekonomi secara keseluruhan diantaranya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari angka PDRB didapat indikator-indikator turunan diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang diperoleh dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dan merupakan suatu gambaran umum mengenai kemajuan ataupun kemunduran perekonomian suatu daerah.

Kemudian dari angka PDRB juga dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduknya, yaitu dengan membagi PDRB dengan penduduk pertengahan tahun, atau sering disebut pendapatan perkapita (PDRB perkapita). Akan tetapi pendapatan perkapita masih merupakan ukuran secara umum/kasar dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu belum sepenuhnya dapat mengukur taraf kesejahteraan masyarakat.

Selain dua indikator di atas dari angka PDRB juga dapat dilihat struktur perekonomian suatu daerah dimana akan tampak sampai seberapa jauh kekuatan ekonomi suatu daerah dan dapat dilihat juga seberapa jauh program-program pembangunan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan diambil pada satu tahun tertentu sudah tepat ke sasaran. Dari struktur perekonomian juga dapat diamati besarnya kontribusi masing-masing 22 sektor ekonomi di suatu daerah dan

pergeseran peranan/kontribusi masing-masing 23 sektor tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung Timur tahun 2005-2012 menunjukkan trend perkembangan yang positif. PDRB atas dasar harga berlaku meningkat menjadi 2.683,494 milyar rupiah di tahun 2012 atau meningkat sebesar 12,96 persen bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang PDRB-nya sebesar 2.375,559 milyar rupiah.

Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006-2012

Tahun	Harga berlaku (Juta Rupiah)	Perkembangan (persen)	Harga Konstan (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006	1.340.449	12,81	714.388	5,17
2007	1.508.527	12,54	752.880	5,39
2008	1.815.062	20,32	798.520	6,06
2009	2.031.585	11,93	837.235	4,85
2010	2.375.850	16,95	886.184	5,85
2011	2.691.045	13,27	939.076	5,97
2012	3.105.629	15,41	996.261	6,09

Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Belitung Timur sebagian besar di sumbang oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 25,58 persen, diikuti sektor jasa-jasa sebesar 17,37 persen serta sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,09 persen.

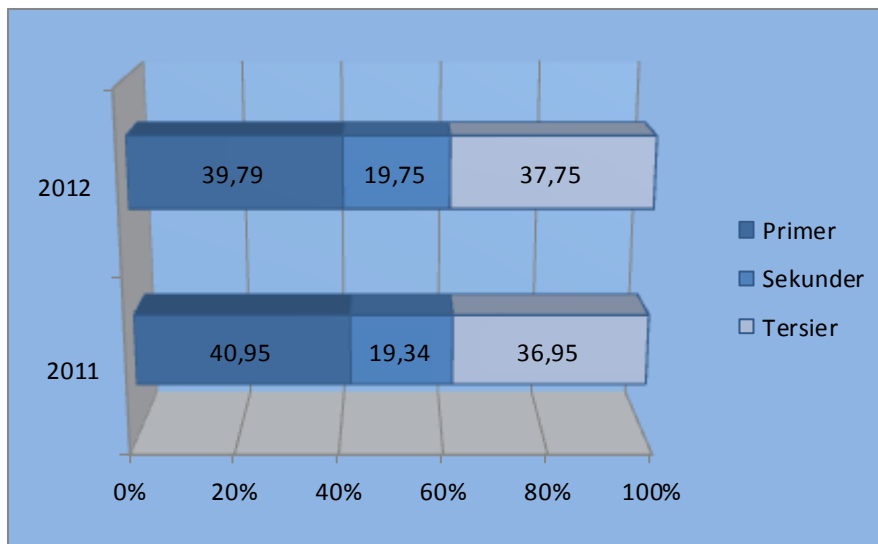
Struktur perekonomian yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2011 maupun tahun 2012 masih berasal dari sektor primer¹. Kontribusi sektor primer pada tahun 2012 sebesar 39,79 menurun bila dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 40,95 persen. Namun kenaikan

¹ Sektor Primer : Pertanian, Pertambangan dan Penggalian

terjadi pada kontribusi sektor sekunder² di tahun 2012 dari 19,34 persen di tahun 2011, menjadi 19,75 persen di tahun 2012. Begitu pula kontribusi sektor tersier juga mengalami peningkatan, dimana kontribusinya di tahun 2011 sebesar 36,95 persen, pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 37,75 persen.

Gambar 3.1

Struktur Ekonomi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 dan 2012 (Persen)



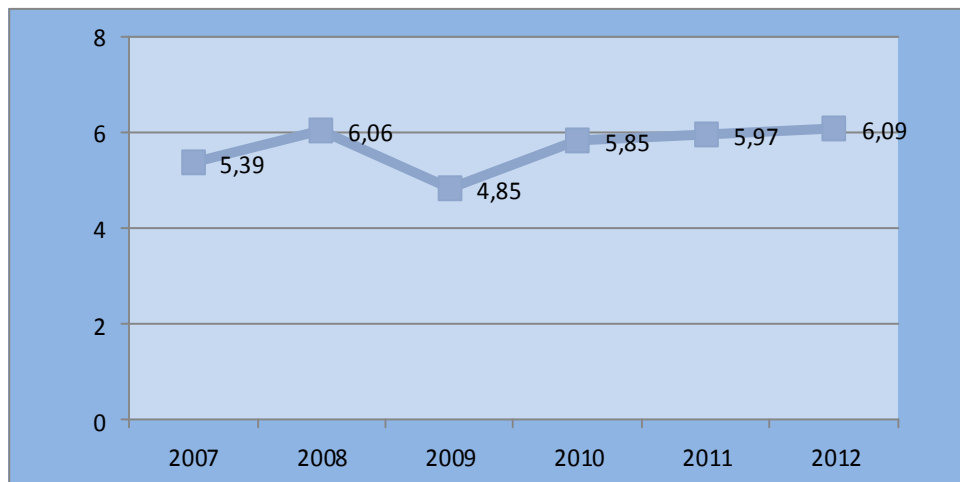
Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang diperoleh dari perkembangan PDRB atas harga konstan tahun 2000 untuk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2012 adalah sebesar 6,09 persen. Laju Pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2011 yang tumbuh sebesar 5,97 persen.

² Sektor Sekunder : Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih dan Bangunan

³ Sektor Tersier : Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan & Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa

Gambar 3.2

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2007-2012 (Persen)**



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur tidak terlepas dari meningkatnya laju pertumbuhan pada hampir seluruh sektor lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan yaitu sebesar 10,43 persen, diikuti sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan sebesar 9,38 persen, serta sektor jasa-jasa yang tumbuh sebesar 8,30 persen.

Pendapatan per kapita riil atau pendapatan perkapita atas dasar harga konstan (faktor harga dieliminir) Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2012 mencapai 7.490.160 rupiah, meningkat sebesar 3,56 persen bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang pendapatannya sebesar 7.232.820 rupiah. Sedangkan berdasarkan harga berlaku di tahun 2012, pendapatan perkapita mencapai 24.172.694 rupiah atau meningkat sebesar 12,72 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang pendapatannya sebesar 21.440.654 rupiah.

3.5. ALOKASI APBD

Struktur APBD pada anggaran yang berbasis kinerja dengan sistem Surplus/Defisit Anggaran berdasarkan keputusan mendagri Nomor 22 tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha dan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, dapat dibagi dalam tiga komponen besar yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Realisasi APBD 2012) K-2 yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Belitung Timur, Pendapatan/penerimaan daerah Kabupaten Belitung Timur pada tahun anggaran 2012 sebesar 535,09 milyar rupiah atau naik sebesar 10,80 persen bila dibandingkan dengan tahun 2011. Penerimaan daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 47,62 milyar rupiah, Dana Perimbangan sebesar 429,41 milyar rupiah dan Pendapatan Lain yang Sah sebesar 58,06 milyar rupiah.

Dengan persentase kontribusi tertinggi masih berasal dari Dana Perimbangan sebesar 80,25 persen dari total penerimaan daerah, diikuti kontribusi Pendapatan Lain-lain yang Sah sebesar 10,85 persen, dan kontribusi terakhir yaitu yang kontribusinya paling kecil berasal dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 8,90 persen dari total penerimaan daerah.

Tabel 3.2 APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2012				
No	Struktur APBD	Realisasi 2011 (Rupiah)	Realisasi 2012 (Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PENDAPATAN			
1	Pendapatan Asli Daerah	55.689.731.534,58	47.623.492.083,79	8,90
2	Dana Perimbangan	384.075.881.180,00	429.407.062.782,00	80,25
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	43.158.501.750,41	58.065.572.145,17	10,85
	Jumlah Pendapatan	482.924.114.464,99	535.096.127.010,96	100
II	BELANJA			
1	Tak Langsung	190.589.693.038,38	212.125.620.392,79	39,47
2	Langsung	250.309.939.530,00	325.348.800.785,74	60,53
	Jumlah Belanja	440.899.632.568,38	537.474.421.178,53	100
III	PEMBIAYAAN			
1	Penerimaan Daerah	120.168.274.883,39	182.203.816.700,56	
2	Pengeluaran Daerah	7.066.036.761,19	12.008.167.017,42	
	Jumlah Pembiayaan	113.102.238.122,20	170.195.649.683,14	

Sumber : Survei K-2 Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (realisasi APBD 2012)
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Belitung Timur yang diolah

Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2012 berjumlah 537,47 milyar rupiah. Belanja Daerah tersebut terbagi menjadi dua yaitu yang dipergunakan bagi Belanja Langsung (terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan jasa, Modal) dan Belanja Tidak Langsung (terdiri atas Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi hasil, Bantuan Keuangan dan Tidak Terduga) . Untuk Belanja Langsung sendiri yaitu sebesar 325,35 milyar rupiah, sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 212,12 milyar. Atau total belanja naik 21,90 persen bila dibandingkan dengan tahun 2011.

Posisi Pembangunan Manusia



Posisi Pembangunan Manusia

4.1. POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan sebagai ukuran posisi pembangunan manusia dan penentuan kebijakan. Upaya yang dapat dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasinya dalam pembangunan dapat diukur melalui indikator ini. Namun indeks ini hanya akan dapat memberikan gambaran informasi tersebut melalui perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah. Pada publikasi/laporan ini secara khusus hanya disajikan perbandingan antar waktu yaitu tahun 2007 dan tahun 2012.

Sebelum pembahasan mengenai perbandingan IPM antar waktu perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan dari masing-masing indikator (komponen) pembentuk IPM. Dimana dalam penghitungan IPM mencakup 3 (tiga) indikator/komponen di dalamnya. Komponen-komponen tersebut adalah indeks lamanya hidup yang diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir, indeks pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah serta indeks paritas daya beli/tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan.

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam publikasi/laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran.

4.2. KOMPONEN-KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 4.1. Nilai Komponen IPM

Tahun	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Paritas Daya Beli
	(tahun)	(persen)	(tahun)	(000 rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	67,90	96,50	7,50	616,30
2012	69,28	96,74	7,72	633,09

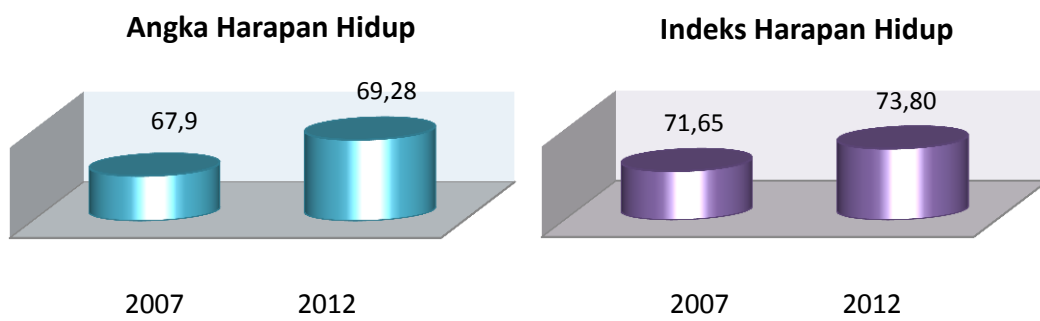
4.3. INDEKS LAMANYA HIDUP (*Longevity Index*)

Indeks Lamanya Hidup yang diwakili dengan Angka Harapan Hidup (e_0) diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia di bidang kesehatan. Pada tahun 2007 indeks harapan hidup di Kabupaten Belitung Timur sebesar 71,65 persen meningkat menjadi 73,80 persen pada tahun 2012.

Meningkatnya indeks lamanya hidup yang dicirikan dengan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir (*Life Expectation at Birth*) sebagai indikator pembentuknya, dari 67,9 tahun di tahun 2007 meningkat

menjadi 69,28 tahun di tahun 2012. Ini berarti usia penduduk Belitung Timur bertambah panjang 1,38 tahun yaitu menjadi 69,28 tahun atau mempunyai kemungkinan dapat bertahan hidup hingga umur lebih dari 69 tahun dan ini merupakan petunjuk positif bahwa kualitas hidup penduduk telah meningkat.

Gambar 4.1
Angka Harapan Hidup dan Indeks Harapan Hidup
Kabupaten Belitung Timur 2007 dan 2012



Meningkatnya angka harapan hidup merefleksikan dalam kurun waktu tersebut seluruh indikator kesehatan meningkat, masyarakat bertambah sehat, aparatur dan sistem kesehatan berjalan semakin baik, fasilitas kesehatan semakin baik, jumlah tenaga medis semakin mencukupi serta program dan kebijakan menunjukkan implikasi yang positif.

Jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belitung Timur di tahun 2012 untuk dapat berobat gratis tidak serta merta meningkatkan derajat kesehatan yang ditandai dengan tingginya angka harapan hidup, semuanya merupakan *resultante* dari seluruh aspek yang dirasakan pada generasi yang akan datang secara bertahap.

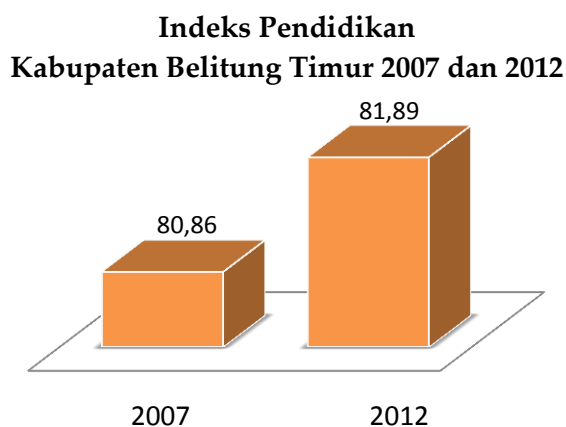
Dan program peningkatan kualitas serta penyediaan terhadap sumber-sumber pelayanan kesehatan oleh pemerintah serta memupuk

kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, harus tetap dilaksanakan, secara bertahap, terencana, dan serta terarah untuk menyentuh masyarakat sebagai bagian inti dari sasaran pembangunan dan ini merupakan tugas kita bersama.

4.4. INDEKS PENDIDIKAN

Indeks pendidikan yang merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, meningkat yaitu dari 80,86 persen pada tahun 2007 menjadi 81,89 persen di tahun 2012.

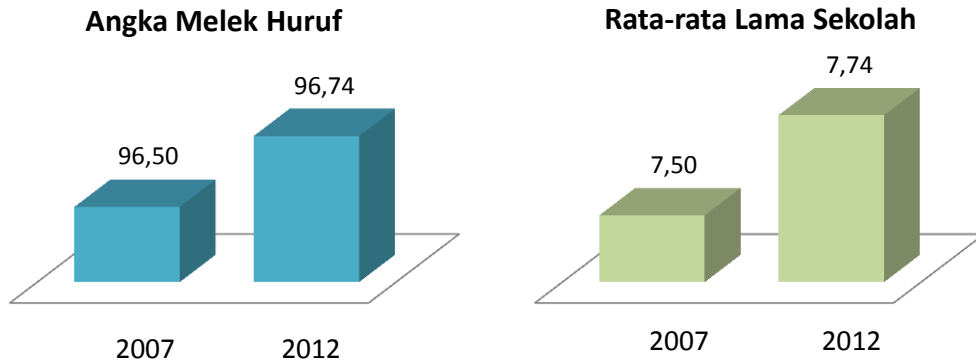
Gambar 4.2



Hal ini dikarenakan komponen angka melek huruf mengalami peningkatan dari 96,50 persen di tahun 2007 menjadi 96,74 persen pada tahun 2012. Yang berarti bahwa kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, penduduk Belitung Timur pada kelompok umur yang sama cenderung meningkat menjadi lebih dari 96 penduduk dari seratus penduduk usia 15 tahun keatas di tahun 2012, atau hanya 3,26 persen penduduk yang buta huruf pada kelompok umur tersebut. Yang ditandai dengan peningkatan indeks melek hurufnya juga.

Gambar 4.3

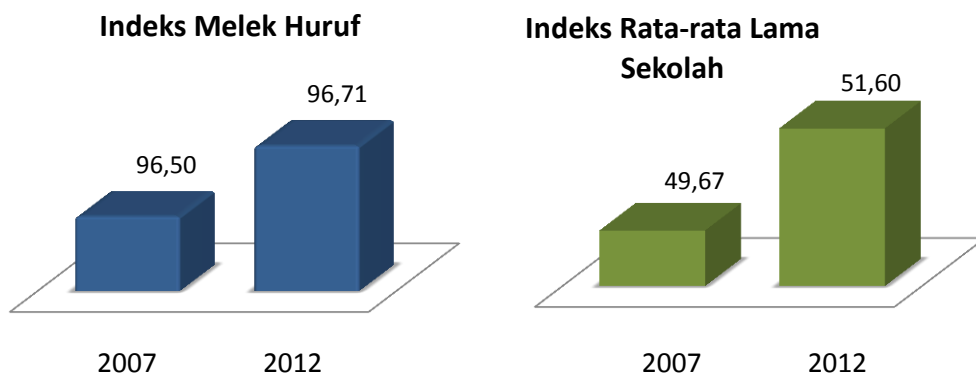
**Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Belitung Timur 2007 dan 2012**



Dengan rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 7,50 tahun pada tahun 2007 menjadi 7,74 tahun pada tahun 2012. Yang dapat diartikan bahwa lama sekolah penduduk Belitung Timur secara rata-rata pada tahun 2012 hanya sampai pada kelas 1 SMP dan ini cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 4.4

**Indeks Angka Melek Huruf dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Belitung Timur 2007 dan 2012**



Peningkatan kualitas dan prasarana pendidikan serta jaminan untuk dapat terus bersekolah menjadi sangat penting, untuk memperbesar peluang menjadi hidup lebih baik dan bahagia selamanya. Dapat dipenuhi dengan keinginan untuk terus belajar dilengkapi dengan prasarana yang memadai dan dengan pendidikan yang berkualitas diiringi jaminan untuk dapat terus bersekolah.

Wajib belajar (wajar) 9 tahun atau hingga SLTP/SMP dirasa belum cukup bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, sehingga peningkatan Sumber Daya Manusia harus terus dilaksanakan sesuai dengan visinya. Pada tahun 2012, diberikan jaminan pendidikan gratis tidak hanya SLTP/SMP tapi hingga tingkat SMU/SLTA dan ini meningkatkan indikator-indikator pendidikan secara bertahap.

Selain itu, upaya membuka *mind set* masyarakat bahwa pendidikan tinggi itu penting perlu juga digalakkan, karena masyarakat masih banyak yang berpikiran bahwa pendidikan tinggi itu tidak penting selama anaknya dapat bekerja. Dalam hal ini, sebagian besar dari mereka yang putus sekolah merupakan anak usia sekolah yang bekerja di bidang pertambangan timah.

4.5. INDEKS PARITAS DAYA BELI

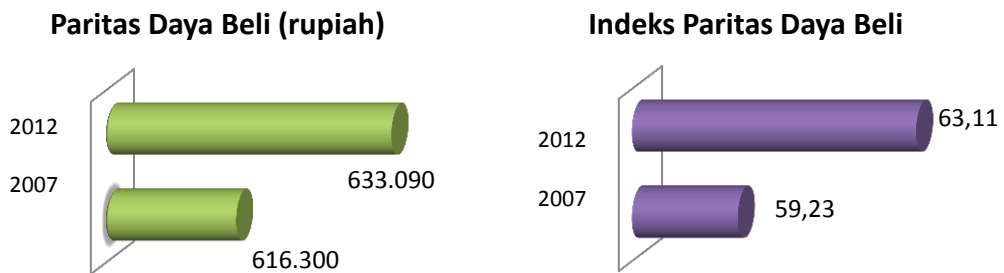
Komponen PPP (*Purchasing Power Parity*) atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak, dalam laporan ini digunakan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Dengan indeks PPP di Kabupaten Belitung Timur 59,23 persen pada tahun 2007, dan mengalami peningkatan juga di tahun 2012 menjadi 63,11 persen. Hal ini menunjukkan kemampuan daya beli penduduk Kabupaten

Belitung Timur relatif meningkat. Atau dengan daya beli penduduk dari 616.300 rupiah meningkat menjadi 633.090 rupiah tahun 2012.

Gambar 4.5

**Paritas Daya Beli dan Indeks Paritas Daya Beli
Kabupaten Belitung Timur 2007 dan 2012**



Dan pemerataan pendapatan terhadap hasil-hasil perekonomian bagi masyarakat akan menjamin seluruh pemenuhan kebutuhan hidup menjadi lebih baik dan penyediaan lapangan pekerjaan yang *suistainable* pengganti tambang timah tetap terus harus dilakukan, sehingga keadaan masyarakat dapat terus naik ke tingkat yang tinggi dari keadaan untuk berusaha sekedar bertahan hidup.

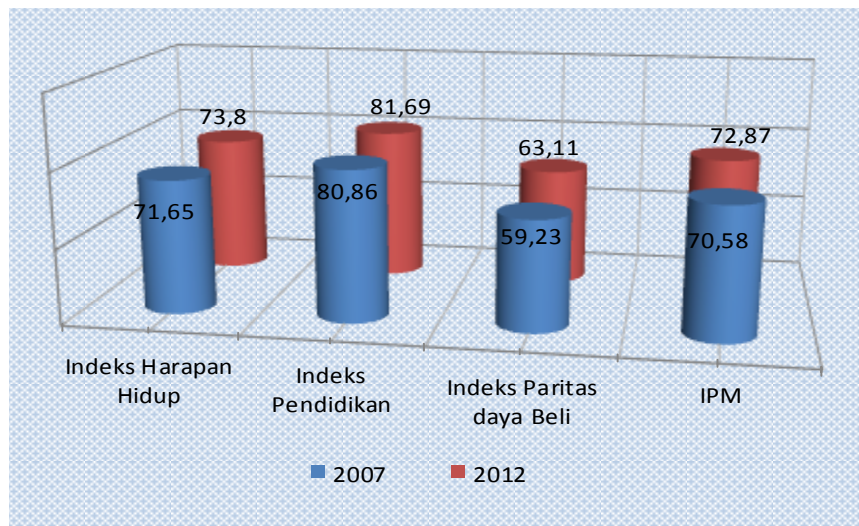
4.6. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Perbandingan antar indikator/komponen-komponen merupakan suatu tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu komponen saja dan merupakan ukuran posisi. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan sebuah jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara komprehensif dari tingkat pencapaian pembangunan

manusia di daerah. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah/wilayah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang telah dicapai di wilayah tersebut.

Gambar 4.6

**Nilai Indeks Komponen IPM
Kabupaten Belitung Timur 2007 dan 2012**



Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2007 sekitar 70,58 kemudian mengalami peningkatan menjadi 72,87 pada tahun 2012. Dengan posisi ranking IPM Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2007 dan 2012 berada pada peringkat ke-4 dari 7 kabupaten/kota, atau peringkat pertama dari 4 kabupaten pemekaran se-Kepulauan Bangka Belitung.

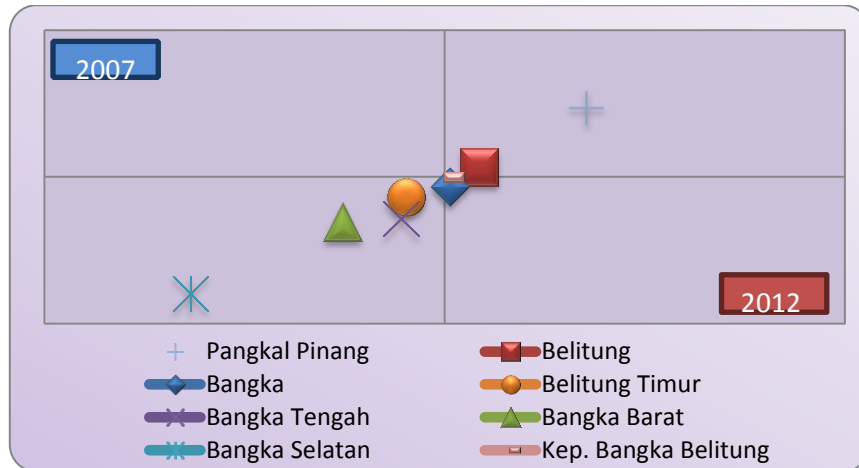
Tabel 4.2. Nilai Indeks Komponen IPM

Tahun	Indeks Harapan Hidup	Indeks Pendidikan	Indeks Paritas Daya Beli	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	71,65	80,86	59,23	70,58
2008	72,27	80,97	60,29	71,18
2009	72,67	81,02	61,24	71,64
2010	73,05	81,08	61,73	71,96
2011	73,43	81,65	62,26	72,45
2012	73,80	81,69	63,11	72,87

Berdasarkan kriteria BPS, BAPPENAS, UNDP, 2001 nilai IPM kurang dari 50 digolongkan sebagai IPM rendah, nilai IPM antara ($50 \leq \text{IPM} < 66$) digolongkan sebagai IPM menengah kebawah, nilai IPM antara ($66 \leq \text{IPM} < 80$) digolongkan sebagai IPM menengah keatas dan nilai IPM lebih dari 80 digolongkan IPM tinggi. Dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Kabupaten Belitung Timur tergolong IPM menengah keatas, baik IPM pada tahun 2007 maupun IPM pada tahun 2012, atau tergolong pada kategori menengah ke atas menurut skala internasional.

Gambar 4.7

IPM menurut Kabupaten/Kota tahun 2007-2012



Jika perubahan posisi IPM periode 2007-2012 dilihat pada gambar 4.7, dengan sumbu vertikal adalah IPM tahun 2007 dan sumbu horizontal adalah nilai IPM 2012. Dan pada gambar tersebut terdapat sumbu yang menggambarkan nilai IPM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2007 dan 2012, yang membentuk empat kuadran. Maka, kuadran I adalah yang berada di sebelah kanan dan atas sumbu IPM Kep. Bangka Belitung pada posisi ini hanya ada Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Belitung, merupakan IPM yang cukup ideal (baik), baik pada tahun 2007 dan 2012 masih berada diatas IPM propinsi. Sebaliknya pada posisi nilai IPM yang perlu benar-benar diperhatikan berada pada kuadran III, yaitu sebelah bawah sumbu IPM Kep. Bangka Belitung 2007 dan sebelah kiri IPM Kep. Bangka Belitung 2012, yang terdiri dari kelima kabupaten lainnya. Pada posisi ini dapat berarti selama 2007-2012 IPM kelima kabupaten masih berada dibawah IPM Kep. Bangka Belitung. Kuadran II berada di sebelah atas IPM Kep. Bangka Belitung 2007 dan sebelah kiri IPM Kep. Bangka Belitung 2012. Akan tetapi perlu diperhatikan sekedar sebagai catatan teknis bahwa periode setahun 2007-2012 mungkin waktu terlalu

singkat untuk meningkatkan IPM menjadi sangat signifikan, tetapi hal ini dijelaskan sebagai salah satu cara membandingkan posisi IPM secara keseluruhan.

Jika diukur dengan skala dari ke 7 kabupaten/kota se-Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya 1 kabupaten yang termasuk kelas pembangunan manusia menengah bawah yaitu kabupaten Bangka Selatan, dan lainnya termasuk kelas menengah atas. Sedangkan jika dibandingkan secara nasional Kabupaten Belitung Timur masih menempati peringkat ke 203 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Penutup



5.1. KESIMPULAN

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator komposit merupakan salah satu ukuran yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah terutama upaya pemberdayaan dan kualitas sumber daya manusia dan partisipasinya dalam pembangunan.
- b. Selama kurun waktu 2007-2012 terjadi peningkatan kinerja pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Belitung Timur. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan IPM dari 70,58 pada tahun 2007 menjadi 72,87 pada tahun 2012.
- c. IPM Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2007 dan 2012 masih menduduki peringkat ke-4 dari 7 kabupaten/kota se-Kepulauan Bangka Belitung atau peringkat 1 dari ke-4 kabupaten pemekaran. Baik pada tahun 2007 dan 2012 IPM Kabupaten Belitung Timur berdasarkan kriteria BPS, BAPPENAS, dan UNDP digolongkan **IPM menengah keatas**.
- d. Indeks Harapan Hidup Kabupaten Belitung Timur terjadi peningkatan selama kurun waktu 2007-2012 dari 71,65 pada tahun 2007 menjadi 73,80 pada tahun 2012. Yang ditandai dengan

meningkatnya angka harapan Hidup dari 67,9 menuju ke 69,28 tahun kurun waktu 2007-2012.

- e. Indeks pendidikan Kabupaten Belitung Timur terjadi peningkatan selama kurun waktu 2007-2012 dari 80,86 pada tahun 2007 menjadi 81,69 tahun 2012. Diikuti oleh kedua indikator pembentuknya Angka Melek Huruf dari 96,5 persen menjadi 96,74 dan Rata-rata lama sekolah dari 7,5 tahun menjadi 7,74 tahun kurun waktu 2007-2012.
- f. Dan meningkatnya indeks paritas daya beli penduduk Kabupaten Belitung Timur dari 59,23 pada tahun 2007 menjadi 63,11 pada tahun 2012. Yang ditandai dengan meningkatnya daya beli dari 616.300 rupiah tahun 2007 menjadi 633.090 rupiah di tahun 2012.

5.2. IMPLIKASI KEBIJAKAN

- a. Adanya peningkatan indeks kesehatan menunjukkan perkembangan positif bahwa kondisi kesehatan masyarakat Belitung Timur menjadi semakin baik. Kondisi ini harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan fasilitas kesehatan, meningkatkan mutu dan kuantitasnya, serta selalu memperhatikan jumlah tenaga medis yang siaga dan siap melayani di setiap daerah di Kabupaten Belitung Timur.

Upaya peningkatan kesehatan dapat dilakukan melalui :

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bentuk peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pola hidup sehat yang bersifat preventif dengan cara mengkonsumsi

- makanan yang bergizi seimbang maupun menjaga kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- Adanya beberapa daerah yang masih kesulitan akses air bersih dan tidak tersedianya sarana sanitasi umum perlu lebih diperhatikan dan diupayakan solusi pemecahannya. Namun ada pula beberapa daerah yang sudah diberikan fasilitas kebersihan berupa WC umum dan sumur bersama, namun tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya dengan alasan tidak terbiasa. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah terutama aparat desa, untuk lebih menggalakkan dan memberi penyuluhan kepada warganya akan pemanfaatan WC umum. Karena masih banyak masyarakat yang lebih memilih lokasi hutan/kebun/pantai sebagai tempat pembuangannya.
 - Pemeliharaan dan penambahan fasilitas kesehatan dan penambahan tenaga kesehatan yang berkualitas untuk lebih melebarkan layanan kesehatan pada masyarakat termasuk di daerah pedesaan.
 - Meningkatkan status gizi dan kesehatan terutama ibu hamil dan balita dengan cara pemberian kapsul zat besi terhadap ibu hamil, pemberian kapsul yodium (untuk ibu hamil, nifas dan Wanita Usia Subur (WUS) serta pemberian kapsul vitamin dan imunisasi kepada balita.
- b. Upaya peningkatan pendidikan dapat dilakukan melalui :
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga diharapkan tercipta generasi muda yang berkualitas.

- Pengadaan bantuan bagi siswa yang kurang mampu dengan cara pembebasan segala macam biaya pendidikan/beasiswa perlu ditingkatkan.
 - Peningkatan angka melek huruf sebagai upaya pemberantasan buta aksara melalui Kejar Paket A/B/C yang ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok pembaca dan penyediaan perpustakaan keliling.
 - Menggiatkan program orang tua asuh kepada anak putus sekolah maupun yang kurang mampu.
 - Upaya peningkatan dan penganekaragaman pendidikan non formal dalam bentuk kursus/ketrampilan untuk menambah wawasan/pengetahuan, misalnya melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- c. Upaya peningkatan daya beli masyarakat melalui :
- Perluasan lapangan pekerjaan baik sektor formal maupun informal.
 - Meningkatkan usaha untuk menggerakkan kelompok usaha industri kecil, agar lebih berkompeten dari segi kualitas, sehingga mampu bersaing dipasaran, membantu kemudahan dalam peminjaman modal dalam rangka pembiayaan usaha, agar terdorong untuk memulai usaha-usaha sendiri tanpa harus selalu mengandalkan sumber daya alam baik pertambangan penggalian maupun perikanan tangkap.
 - Menciptakan kondisi dan suasana yang bukan saja memberi ruang gerak inisiatif yang sebesar-besarnya kepada para pelaku ekonomi tetapi juga mendorong serta membantu usaha kecil, tradisional dan sektor informal.

Pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki manusia. Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Yang merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan sehingga terwujudlah masyarakat yang sejahtera, dengan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh, melalui pemberdayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki.

Paradigma pembangunan yang diperkenalkan *United Nations Development Programme* (UNDP) pada dasawarsa 1990-an dikenal sebagai Paradigma Pembangunan Manusia tidak saja menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan menempatkan pendapatan sebagai ukuran pencapaian suatu pembangunan, melainkan memperhitungkan pula ukuran pencapaian pembangunan manusia.

Pembangunan manusia mempunyai batasan yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan ekonomi, karena tujuan pembangunan manusia bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan penduduk, melainkan diarahkan kepada tercapainya produktivitas yang tinggi, yang diikuti dengan pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Dengan kata lain pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut dapat dicapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan kemungkinan panjang umur; berpendidikan dan berketerampilan; serta

mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak, yang digambarkan dengan sebuah Indikator Komposit.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia suatu wilayah melalui tiga dimensi pokok pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak.

Keberhasilan pembangunan manusia ditandai dengan peningkatan usia rata-rata masyarakatnya dan juga ditandai dengan peningkatan pengetahuan yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya dengan tercapainya dua hal tersebut, akan meningkatkan produktifitas yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu hidup yang layak bagi masyarakat.

DATA

Mencerdaskan Bangsa

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Komplek perkantoran terpadu pemda kab. Beltim
Jl. Raya manggar - gantung , manggar, Belitung Timur